



### ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA TERHADAP EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Oleh :

**Mesak Borolayuk**

Email : [mesakbo@gmail.com](mailto:mesakbo@gmail.com)

Pembimbing I :

**FIRMAN MENNE**

Email : [firman@univ45.ac.id](mailto:firman@univ45.ac.id)

Pembimbing II :

**THANWAIN**

Email : [thanwainak@yahoo.com](mailto:thanwainak@yahoo.com)

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa**

#### ABSTRAK

Mesak Borolayuk. 2015. *Analysis of The Financial Perfomance of The Mamasa Regency of The Efficiency of Local Government District Revenue*. Final Report. Department of Accounting. Faculty of Economics . Bosowa University. Supervising I.Firman Menne,SE.,M.Si AK,CA The Supervising II. Thanwain SE., M. Si. 61 pages.

Regional autonomy (decentralization) is a regional authority to regulate and manage the interests of society at its own initiative based on community aspirations and according to laws and regulations. One aspect of local government that must be regulated carefully is the financial management area. To analyze the performance of local governments in managing local finances can be done with the financial ratio analysis. The financial ratios used include: the ratio of independence, effectiveness ratios, growth ratios, and the efficiency ratio of revenue.

The purpose of this study was to determine the financial performance of the Regency Mamasa significant effect on the efficient use of revenue. The population in this study, namely Regency Budget Realization Report Mamasa in which samples are taken is eight years (2011-2014). The variables studied include selfsufficiency ratio, the ratio of effectiveness, and growth ratios as independent variables as well as the efficiency of the revenue as the dependent variable. -----

**Keywords:** Ratio of Independence, Effectiveness Ratio, Growth Ratio, Efficiency Ratio, Revenue (PAD)

### **PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah**

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemda tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong Pemda untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya otoda adalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (*desentralisasi*). Selain itu, keadaan luar negeri yang banyak menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk setiap Pemdanya. Hal tersebut akan tercapai dengan peningkatan kemandirian Pemda melalui program otoda. Tujuan program otoda adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Salah satu aspek dari Pemda yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Nordiawan, dkk, 2007: 39)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh Pemda adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemda atas sumber yang dipercayakan. Pemda sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otda.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan

secara bulat mengenai nama dan kaidah peraturannya. Namun, analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otoda sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi Pemda untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan. Maraknya pembahasan mengenai keuangan daerah, terutama hubungannya dengan otoda yang sementara berlangsung menjadikan hal ini menarik untuk dibahas. Peneliti memilih salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamasa, dipertanggungjawabkan penggunaannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membuktikan kemampuan Pemda Mamasa dalam mengelola keuangan daerahnya dan melihat dari efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengangkat judul, **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah bagaimana gambaran kinerja keuangan daerah Pemkab mamasa dalam empat tahun terakhir (2011-2014)?

### **TINJAUAN PUSTAKA Kerangka Teori**

Irham Fahmi dkk. (2011:22) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan, sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini melampirkan sejarah perusahaan yang dikuantitatifkan dalam nilai moneter.

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Mardiasmo (2002:162), tujuan umum laporan keuangan bagi organisasi pemerintahan adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada masukan (*input*) program, tetapi juga pada keluaran (*output*) dari program tersebut.

Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, sepertidengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standard an ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Accepted Accounting principle) dan lainnya.

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau deficit. laporan lainnya yang dipernankan adalah perubahan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan kinerja keuangan atau disebut juga dengan laporan pendapatan dan biaya laporan surplus atau deficit atau laporan profited loss adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama periode tertentu.

## METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol X dan variabel dependen atau terikat yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol Y.

### 1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang diduga memengaruhi variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_1$ )

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. *Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.*

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

#### b. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ )

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. *Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.*

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

c. Rasio Pertumbuhan ( $X_3$ )

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. *Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.*

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}}$$

## 2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah rasio efisiensi PAD (Y).

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

### *Rasio Efisiensi*

$$= \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{realisasi Penerimaan PAD}}$$

Sedangkan Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

### A. Analisis deskripsi kuantitatif

Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Realisasi Anggaran yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2011-2014. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Pemda Kabupaten Mamasa dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio-rasio.

### B. Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa kinerja kemandirian keuangan daerah Pemkab Mamasa terhadap efisiensi PAD.

Formulasi persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$  (Ghozali, 2009:13)

di mana:

Y	: rasio efisiensi PAD	X <sub>1</sub>	: rasio kemandirian keuangan
a	: bilangan konstanta	X <sub>2</sub> X <sub>3</sub>	: rasio efektifitas
b <sub>1</sub> -b <sub>3</sub>	: koefisien regresi	e	: rasio belanja
			: variabel pengganggu

### Hasil Analisis a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Rasio kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, terutama pemerintah pusat dan provinsi. *Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.*

Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Mamasa dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut (berdasarkan lampiran):

Tabel 1  
Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Mamasa Tahun  
Anggaran 2011-2014(Dalam Ribuan)

<b>Keterangan</b> <b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>Rasio Kemandirian</b>
2011	7.682.187	368.298.230	53.391.468	<b>16,58%</b>
2012	7,726,698	447.563.858	31.169.339	<b>8,69%</b>
2013	14,703,185	531,534,725	26,671732	<b>7,78%</b>
2014	15.500.227	532.005,797	44.533.963	<b>12,41%</b>

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (Lampiran)

Pada tabel 5.1 di atas, diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemkab Mamasa dalam empat tahun terakhir (2011-2014) mengalami satu kenaikan, yaitu pada tahun 2013-2014 sebesar 4,63% (12,41%-7,78%), Selebihnya mengalami penurunan , yaitu 2011-2012 sebesar 7,89% (16,58%-8,69%),

### b) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. *Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.*

Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Mamasa dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

Hasil perhitungan rasio efektifitas PAD dapat dilihat pada tabel berikut (berdasarkan lampiran):

Tabel 2

Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun Anggaran 2011-2014

<b>Keterangan</b> <b>Tahun</b>	<b>Target</b> <b>Penerimaan</b> <b>PAD</b>	<b>Realisasi</b> <b>Penerimaan</b> <b>PAD</b>	<b>Rasio</b> <b>Efektifitas</b>
2011	8.955.000	7.682.187	<b>86,%</b>
2012	8.500.000	7,726,698	<b>90,90%</b>
2013	12,870,455	14,703,185	<b>114%</b>
2014	18.083.539	15.500.227	<b>86%</b>

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (Lampiran)

Pada tabel 5. 2 di atas, dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pemkab Mamasa dalam empat tahun terakhir (2011-2014) mengalami kenaikan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2011-2012 sebesar 4,90 (90,90%86%), 2012-2013 sebesar 24,90% (114%-90,90%), Selebihnya mengalami penurunan pada tahun 2013-2014 sebesar 28% (114%-86%),

### c) **Pertumbuhan**

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar Kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan PAD, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. *Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.*

Rasio pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Mamasa dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}}$$

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat pada tabel berikut (berdasarkan lampiran):

Tabel 3  
Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Mamasa  
Tahun Anggaran 2011-2014 (dalam ribuan)

<b>Keterangan Tahun</b>	<b>PAD<sub>t0</sub></b>	<b>PAD<sub>t1</sub></b>	<b>Rasio Pertumbuhan</b>
2011-2012	7.682.187	7.726.698	<b>0,57%</b>
2012-2013	7.726.698	14.496727	<b>87%</b>
2013-2014	14.496727	15.500.227	<b>6,92%</b>

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (Lampiran)

Pada tabel 5.3 di atas, ada dua periode dalam empat tahun terakhir (2011-2014) di mana rasio pertumbuhan Pemkab Mamasa negatif, yaitu pada tahun 2011-2012 sebesar 0,57 %, Adapun rasio pertumbuhan yang mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2012-2013 sebesar 0,57% naik menjadi 87%, namun di tahun 2013-2014, menurun dari 87% menjadi 6,92%.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan daerah Pemkab Mamasa dalam empat tahun terakhir terbukti baik. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan dari tahun(2011-2014).
2. Efektifitas PAD Pemkab Mamasa dalam empat tahun terakhir terbukti efisien. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio efektifitas PAD dari tahun(2011-2014).
3. Secara parsial, rasio efektifitas Pemkab Mamasa tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada empat tahun terakhir (2011-2014)

4. Secara simultan, rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada Mamasa dalam empat tahun (2011-2014)

### DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sawir, 2008, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, edisi keenam, penerbit : Gramedia pustaka utama, Jakarta
- Ahmad Rodoni, 2010, *Manajemen Keuangan*, edisi pertama, penerbit : Mitra wacana media, Jakarta
- Dermawan Sjahrial, Djahotman Purba, 2012, *Akuntansi Manajemen*, edisi pertama, penerbit : Mitra wacana media, Jakarta
- Idris Arief, 2010, *Teori Motivasi dan Kinerja Karyawan*, Penerbit : Fahmis Pustaka, Makassar
- Ihyaul Ulum 2011 **Audit Sektor Publik tentang kinerja.**
- Irham Fahmi, 2011, *Analisis kinerja Keuangan*, cetakan kesatu, penerbit : Alfabeta, Bandung
- Irham Fahmi, 2012, *Pengantar Manajemen Keuangan*, edisi pertama, penerbit : Mitra wacana media, Jakarta
- Kasmir, 2011, *Analisi Laporan Keuangan*, edisi pertama, cetakan keempat, penerbit : PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- L.M.Samryn,SE.,AK.,M.M 2011 **Pengantar Akuntansi** Cetakan pertama September 2011 PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Ryan Ariefiansyah, 2012, *Jurus Kilat Membuat Laporan Keuangan*, penerbit : Laskar Askara, Jakarta Timur
- Sofyan Syafri Harahap, 2002, *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*, edisi pertama, cetakan kedua, penerbit : Bumi Askara, Jakarta
- Sofyan Syafri Harahap, 2011, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, cetakan kesepuluh, penerbit : PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sutrisno. 2009. **Manajemen Keuangan teori,Konsep dan aplikasi.** Edisi Pertama.Cetakan ketujuh. Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi Yogyakarta.



# JURNAL RISET EDISI II

## UNIBOS MAKASSAR JANUARI 2016

---

Van Horne C yang dikutip oleh Kasmir (2009:5), **Pengantar Manajemen keuangan**, Edisi Pertama. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.

Warren, Carls S, Reeve, James M, Fess, Philipe, 2012, *Warren Reeve Fess Accounting Pengantar akuntansi*, edisi 21, penerbit : Salemba Empat, Jakarta